

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAMBI**

*Jl. R.M.Nur Admadibrata No. 04 Jambi*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Jambi, Januari 2022

KEPALA BADAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **1.1.1. Maksud**

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, pengklasifikasian dalam setiap transaksi yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi agar Laporan Keuangan ini dapat dimengerti dan memperoleh penafsiran yang sama.

#### **1.1.2. Tujuan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selaku entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana.
- b. Menyajikan data realisasi anggaran dalam tahun 2021.
- c. Menyajikan informasi mengenai target kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2021.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.**

1. UUD 1945, Khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. UU. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.**

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

#### **1) Laporan Realisasi Anggaran**

Menyajikan informasi pertanggungjawaban SKPD atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

#### **2) Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

#### **3) Laporan Operasional**

Menyajikan Iktisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

#### **4) Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**5) Catatan Atas Laporan Keuangan**

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN**  
**DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

2.1. **Ekonomi Makro.**

Kekayaan Indonesia (sumber daya alam dan sumber daya manusia) saat ini belum optimal termanfaatkan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia antara lain kemiskinan dan kekerasan, dikarenakan pembangunan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Pancasila belum tuntas dan belum menjadi prioritas.

Era Orde Reformasi saat ini (kajian Lemhanas) pemahaman dan penghayatan akan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila terutama untuk generasi muda cenderung menurun. Penetrasi budaya global yang cenderung sekuler, materialistik, individualistik, konsumtif cenderung lebih dominan mewarnai perilaku masyarakat Indonesia. Menurunnya wawasan kebangsaan berakibat menurunnya nasionalisme dan daya saing serta melemahnya karakter. Untuk itu perlu upaya strategis, sistemik, cepat, tepat dan bersama-sama melalui pembangunan wawasan kebangsaan/karakter bangsa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di daerah.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan kesatuan bangsa dan politik yang kondusif, harmonis, komunikatif dan dinamis dalam rangka menuju Jambi MANTAP.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sejalan dengan semangat reformasi
- Membina secara efektif nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.

- Mereposisi diri dari peran regulator menjadi fasilitator, komunikator dan moderator bagi proses demokratisasi.

## 2.2. Kebijakan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 berupa laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Keuangan tahun anggaran 2019 mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Dalam tahun anggaran 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mendapat alokasi dana dalam APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 14.481.095.341,- Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6( ENAM) program dan 33 ( tiga puluh tiga) kegiatan, keseluruhan kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2021	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	9.150.601.066,-	
II.	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.</b>	490.973.385,-	
III	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan</b>	2.494.988.000,-	
IV	<b>Program Pemberdayaan dan</b>	597.524.320,-	

	<b>Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		
V	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	482.148.590,-	
VI	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	1.264.859.980,-	

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

#### Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing – masing kegiatan. Kendatipun untuk indikator outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaian

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan sebagainya, sedangkan indikator outcome belum dapat diukur pada tahun pertama.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2021	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	9.150.601.066,-	
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	189.248.055	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.985.000,-	1 Tahun

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	152.263.055,-	1 Tahun
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</b>	<b>7.646.668.521,-</b>	
1.	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.383.705.116,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	262.963.405,-	1 Tahun
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>70.178.000,-</b>	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.100.000,-	80 stell
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.078.000,-	1 Tahun
		25.035.000,-	1 Tahun
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>430.113.035,-</b>	
1.	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.804.236,-	1 Tahun
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	49.550.000,-	1 Tahun
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.486.250,-	1 Tahun
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.109.240,-	1 Tahun
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.163.309,-	1 Tahun
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>123.468.625,-</b>	

1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.468.625,-	1 Tahun
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>181.178.930,-</b>	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat.	27.000.000,-	1 Tahun
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.577.502,-	1 Tahun
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.835.440,-	1 Tahun
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>509.746.000,-</b>	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.460.000,-	1 Tahun
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.090.000,-	1 Tahun
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.196.000,-	1 Tahun
II.	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>490.973.386,-</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>490.973.385,-</b>	

1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	309.621.833,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	181.351.552,-	1 Tahun
III.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>2.494.988.000,-</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>2.494.988.000,-</b>	
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.131.265.840,-	1 Tahun

2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	247.890.380,-	1 Tahun
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.831.780,-	1 Tahun
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>597.524.320,-</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>597.524.320,-</b>	
1.	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	113.728.960,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	368.635.200,-	1 Tahun

3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	115.160.160,-	1 Tahun
V.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>482.148.590,-</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>482.148.590,-</b>	
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	91.035.040,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	341.790.370,-	1 Tahun
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.323.180,-	1 Tahun
VI.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI</b>	<b>1.264.859.980,-</b>	

<b>PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>			
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>1.264.859.980,-</b>	
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	428.942.580,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	64.266.000,-	1 Tahun
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.791.400,-	1 Tahun
4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	764.860.000,-	1 Tahun

### BAB III

#### IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Hasil Pengukuran kinerja mengenai pencapaian indikator pada tingkat sasaran tahunan dan kegiatan tertuang pada :

1. Formulir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang telah ditentukan.
2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari sasaran yang telah ditentukan.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 4 dibawah ini :

**Tabel 4. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$\geq 90 \%$	Berhasil
70 % - 89,99 %	Cukup Berhasil
50 % - 69,99 %	Kurang Berhasil
$\leq 49,99 \%$	Tidak Berhasil

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA (%)
1	2	3	4
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>		
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	94,82
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	99,26
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</b>		
1.	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	88,19
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	100
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Tahun	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
1.	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	99,97

2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	1 Tahun	97,66
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	100
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	100
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	99,99
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.	Penyediaan jasa surat menyurat.	1 Tahun	100
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	96,40
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	99,98
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	97,17
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana		99,95

3.	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	
II.	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		
	1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun	98,93
III.	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>		
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan</b>		

	<b>Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun	99,98
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun	99,03
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun	99,19
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan</b>		

<b>Organisasi Kemasyarakatan</b>		
1.	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Tahun 99,05
2.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Tahun 100
3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	1 Tahun 99,80
V.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Tahun 99,95
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	1 Tahun 98,58

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Tahun	99,99
VI.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun	100
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun	100
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama	1 Tahun	93,33

	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
4.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Tahun	95,15

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021

Keberhasilan suatu pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan dana.

Realisasi penggunaan dana kegiatan di Badan Kesbangpol Provinsi Jambi sampai dengan 30 Desember 2021 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini .

**Tabel : Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan Tahun 2021**

yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jambi

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2021	REALISASI DANA
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>9.150.601.066,-</b>	<b>8.263.538.213,-</b>
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>189.248.055</b>	<b>186.205.992,-</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.985.000,-	35.070.969,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	152.263.055,-	151.135.023,-
	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>7.646.668.521,-</b>	<b>6.774.450.375,-</b>

	<b>Perangkat Daerah.</b>		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.383.705.116,-	6.511.487.883,-
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	262.963.405,-	262.962.492,-
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>70.178.000,-</b>	<b>70.178.000,-</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.100.000,-	48.100.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.078.000,-	22.078.000,-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>430.113.035,-</b>	<b>428.936.754,-</b>
1.	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.804.236,-	25.796.090,-
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	49.550.000,-	48.388.500,-
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.486.250,-	50.486.201,-
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.109.240,-	14.109.240,-
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.163.309,-	290.156.723,-
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>123.468.625,-</b>	<b>123.456.000,-</b>
1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.468.625,-	123.456.000,-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>181.178.930,-</b>	<b>177.412.942,-</b>

1.	Penyediaan jasa surat menyurat.	27.000.000,-	27.000.000,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.577.502,-	100.577.502,-
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.835.440,-	49.835.440,-
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>509.746.000,-</b>	<b>502.898.150,-</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.460.000,-	231.708.150,-
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.090.000,-	87.090.000,-
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.196.000,-	184.100.000,-
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>490.973.386,-</b>	<b>488.958.091,-</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ideology Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>490.973.385,-</b>	<b>488.958.091,-</b>
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	309.621.833,-	309.555.962,-
2.			

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	181.351.552,-	179.402.129,-
III.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>2.494.988.000,-</b>	<b>2.491.192.044,-</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>2.494.988.000,-</b>	<b>2.491.192.044,-</b>
1.			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.131.265.840,-	2.130.810.000,-
2.			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	247.890.380,-	245.942.276,-

	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.831.780,-	114.889.768,-
IV	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>597.524.320,-</b>	<b>596.216.624,-</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>597.524.320,-</b>	<b>596.216.624,-</b>
1.	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	113.728.960,-	112.652.800,-
2.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	368.635.200,-	368.634.270,-
3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	115.160.160,-	114.929.554,-

	Ormas dan Ormas		
V.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>482.148.590,-</b>	<b>477.250.200,-</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>482.148.590,-</b>	<b>477.250.200,-</b>
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	91.035.040,-	90.993.300,-
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	341.790.370,-	336.940.520,-
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.323.180,-	49.316.380,-
VI.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>1.264.859.980,-</b>	<b>1.227.327.220,-</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan</b>	<b>1.264.859.980,-</b>	<b>1.227.327.220,-</b>

<b>Penanganan Konflik Sosial</b>			
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	428.942.580,-	428.942.580,-
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	64.266.000,-	64.266.000,-
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.791.400,-	6.338.640,-
4.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	764.860.000,-	727.780.000,-

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis menunjukan bahwa dari 33 kegiatan yang telah ditetapkan, semuanya mencapai diatas 90 %, dengan kreteria **berhasil**.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### **4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan**

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dari pengertian diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai entitas akuntansi, hanya menyampaikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis akuntansi yang diguna dalam laporan keuangan SKPD adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan Realisasi Anggaran basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dari rekening kas umum daerah. Dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Bendahara Pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.**

Penyusunan pos – pos laporan keuangan SKPD ( asset, kewajiban dan ekuitas dana ) didasari nilai perolehan historis, yaitu asset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih asset dengan kewajiban.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.**

Secara umum standar akuntansi pemerintah telah diterapkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, terutama proses akuntansi yang dimulai dari jurnal, buku besar dan Neraca baik untuk penatausahaan pendapatan maupun penatausahaan pengeluaran, karena untuk tahun anggaran 2021 ini semua proses akuntansi diselenggarakan dengan program aplikasi SIMDA.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**5.1. Rincian dan Penjelasan masing masing Pos – pos Pelaporan Keuangan SKPD .**

5.1.1. Pendapatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki sumber pendapatan.

5.1.2. Belanja

Jumlah belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp 14.481.095.341,- (Empat belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat satu) terdiri dari 6 Program 34 kegiatan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp. 11.537.411.507,-(93,48 %)

5.1.3. Asset

Jumlah aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.204.854.455.43 terdiri dari :

**Asset Lancar :**

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 Nihil
- b. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 Nihil
- c. Saldo investasi jangka pendek juga nihil
- d. Piutang Nihil
- e. Persediaan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.797.500,00 yang terdiri dari Persediaan Alat kantor pakai habis

**Asset tetap** per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.750.445.724,84

Aset tetap terdiri dari

Peralatan dan Mesin	Rp. 4.917.917.868,-
Terdiri dari:	
- Alat-alat angkutan sebesar	Rp. 3.109.507.000,-
- Alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp. 2.221.415.387,50
- Alat-alat Studio dan komunikasi	Rp. 158.403.000,-
- Alat-alat Keamanan	Rp. 30.000.000,-
Gedung dan Bangunan	Rp. 919.724.000,-
Merupakan Bangunan Gedung	Rp. 1.765.416.857,-
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 67.057.000,-

Merupakan Instalasi Rp. 67.057.000,-

Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 ada tambahan aset sebesar Rp.1.018.096.270,-. Disebabkan adanya pengadaan aset sebagai berikut :

1. Peralatan Kantor Rp. 123.456.000,-
2. Alat Kesehatan Mutasi dinas kesehatan Rp. 2.600.000,-

Sedangkan Akumulasi penyusutan Rp.(4.542.232.522,66)

#### ***Aset Lainnya***

Aset lainnya yang merupakan barang rusak berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 246.163.601,50

#### 5.1.4. Kewajiban

Sampai dengan posisi 31 Desember 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki kewajiban kepada pihak lain baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

- a. Utang perhitungan pihak ketiga ( PFK ) nihil
- b. Uang muka dari kas daerah nihil
- c. Pendapatan diterima dimuka nihil
- d. Utang jangka pendek lainnya Rp. 8.884.806,- terdiri dari :

- Listrik Rp. 6.044.346,-
- Air Rp. 1.148.300,-
- Telepon Rp. 42.160,-
- Internet Rp. 1.650.000,-

#### 5.1.5. Ekuitas

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa aset yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terdiri aset lancar dan aset tetap, maka ekuitasnya terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dalam bentuk investasi.

Ekuitas Dana lancar berjumlah Rp. (8.228.474.00),- terdiri dari :

- a. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp. 8.176.711,00
- b. Cadangan persediaan per 31 Desember 2021 Nihil
- c. Uang muka dari kas daerah nihil

Ekuitas Dana Investasi tahun 2021 sebesar Rp 1.820.304.809,58,- terdiri dari:

- a. Investasi dalam aset tetap Rp. 1.577.056.010,61
- b. Investasi dalam aset lainnya Rp. 28.579.500,00

Apabila dibandingkan dengan ekuitas dana investasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.577.056.010,61 maka terjadi penurunan ekuitas dana investasi

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdomisili di Jalan R. M. Nur Atmadibrata nomor 04 Telanaipura Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

Tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut diatas dioperasionalkan dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2011 tentang Pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2006 tentang Forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2007 tentang Fasilitasi organisasi masyarakat bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman pendidikan wawasan kebangsaan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021 yang meliputi 6 program dan 34 kegiatan telah tercapai rata-rata 93,48 % , realisasi keuangan mencapai 93,48 % , ini mengandung makna adanya kesesuaian jadwal dalam pengelolaan keuangan dan semua kegiatan telah mencapai target dengan kriteria "Berhasil".

Oleh sebab itu kedepan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi akan senantiasa berupaya agar efisiensi keuangan dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai produktivitas yang optimal, Amin.

Jambi, Januari 2022

**KEPALA BADAN**



**H. MUKTI SE. ME**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197011121999031002

Urusan Pemerintahan : 4  
 Bidang Pemerintahan : 4.12  
 Unit Organisasi : 4.12.01  
 Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
 Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

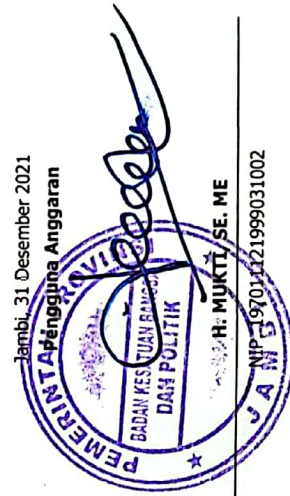
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>BEBAN</b>	13.530.533.903,78	11.463.970.233,46	2.066.563.670,32	18,03
8.1.1	Beban Pegawai	6.821.433.243,00	7.084.111.083,63	(262.677.840,63)	(3,71)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	4.487.770.723,00	4.058.777.041,00	428.993.682,00	10,57
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	2.104.770.000,00	0,00	2.104.770.000,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	98.889.802,00	5.110.656,00	(5.110.656,00)	(100,00)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.831.923,28	297.621.035,11	(198.731.233,11)	(66,77)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	838.212,50	1.673.992,72	157.930,56	0,95
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.676.425,00	(838.212,50)	(50,00)
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00

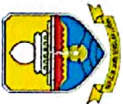
Urusan Pemerintahan : 4  
 Bidang Pemerintahan : 4.12  
 Unit Organisasi : 4.12.01  
 Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
 Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(13.530.533.903,78)	(11.463.970.233,46)	(2.066.563.670,32)	18,03
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(13.530.533.903,78)	(11.463.970.233,46)	(2.066.563.670,32)	18,03
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(13.530.533.903,78)	(11.463.970.233,46)	(2.066.563.670,32)	18,03

Jambi, 31 Desember 2021





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

		2021	2020
<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4 . 12	Kesatuan Bangsa dan Politik		
<b>Unit Organisasi</b> : 4 . 12 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4 . 12 . 01 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
<b>URAIAN</b>			
EKUITAS AWAL		1.598.954.199,61	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(13.530.533.903,78)	(11.463.970.233,46)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Ekuitas		741.201.650,12	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		13.537.411.507,00	0,00
EKUITAS AKHIR		2.347.033.452,95	(11.463.970.233,46)

Jambi, 1 Januari 2021

Pengguna Anggaran



J. MUKTI, SE. ME

NIP. 197011121999031002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 4  
Bidang Pemerintahan : 4.12  
Unit Organisasi : 4.12.01  
Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	14.481.095.341,00	13.537.411.507,00	93,48	11.306.701.425,63
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	14.357.626.716,00	13.413.955.507,00	93,43	11.143.570.175,63
5.1.1	Belanja Pegawai	7.703.145.116,00	6.821.433.243,00	88,55	7.119.343.083,63
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.549.711.600,00	4.487.752.264,00	98,64	4.024.227.092,00
5.1.5	Belanja Hibah	2.104.770.000,00	2.104.770.000,00	100,00	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	123.468.625,00	123.456.000,00	99,99	163.131.250,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.468.625,00	123.456.000,00	99,99	163.131.250,00
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	(14.481.095.341,00)	(13.537.411.507,00)	93,48	(11.306.701.425,63)
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	0,00	0,00	0,00	11.306.701.425,63
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	11.306.701.425,63
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	0,00	0,00	0,00	11.306.701.425,63
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(14.481.095.341,00)	(13.537.411.507,00)	93,48	0,00

Jambi, 1 Januari 2021





**NERACA**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 12                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik  
**Unit Organisasi** : 4 . 12 . 01                      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 12 . 01 . 01                      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

URAIAN	2021	2020
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.185.034,00	1.495.400,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2.185.034,00</b>	<b>1.495.400,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.917.971.867,50	4.794.515.867,50
Gedung dan Bangunan	1.765.416.857,00	919.724.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.057.000,00	67.057.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.542.232.522,66)	(4.204.240.856,89)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.208.213.201,84</b>	<b>1.577.056.010,61</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	12.316.500,00	12.316.500,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	233.847.101,50	233.847.101,50
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(217.584.101,50)	(217.584.101,50)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>28.579.500,00</b>	<b>28.579.500,00</b>

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 12                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik  
**Unit Organisasi** : 4 . 12 . 01                      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 12 . 01 . 01              Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

URAIAN	2021	2020
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.238.977.735,84</b>	<b>1.607.130.910,61</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	8.884.804,00	8.176.711,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>8.884.804,00</b>	<b>8.176.711,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>8.884.804,00</b>	<b>8.176.711,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	2.230.092.931,84	1.598.954.199,61
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.238.977.735,84</b>	<b>1.607.130.910,61</b>

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, laporan tersebut telah dilakukan Review oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Januari 2022

Pengguna Anggaran



**H. MUKTI, SE. ME**

Pembina Utama Muda

NIP. 197011121999031002

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Satuan Kerja tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 13.537.411.507,- atau mencapai 93,48 % dari anggarannya Rp. 14.481.095.341,-

### **2. NERACA**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset lancar per 30 Desember 2021 adalah sebesar

Rp 2.185.034,-.

Jumlah kewajiban jangka pendek per 30 Desember 2021 adalah sebesar

Rp 8.884.804,-

Jumlah ekuitas dana lancar per 30 Desember 2021 adalah sebesar

Rp 2.353.733.222,95,-.

Jumlah ekuitas dana dalam investasi per 30 Desember 2021 adalah sebesar

Rp 2.353.733.222,95,-

Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp 2.353.733.222,95,-

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp 2.353.733.222,95

### **3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Berdasarkan Mutasi dari Dinas PU Prov. Jambi Kepada Badan Kesbangpol Prov. Jambi berupa

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen lainnya Rek. Perencanaan renovasi dan pengembangan bangunan gedung Kesbangpol (ABT) Tahun 20214 sebesar Rp. 72.196.857.34
2. Bangunan gedung kantor permanen lainnya rek. Pembangunan gedung Kesbangpol Prov. Jambi Tahun 2015 sebesar Rp. 232.048.800
3. Bangunan gedung kantor permanen lainnya rek. Pembangunan gedung Kesbangpol Prov. Jambi Tahun 20215 Rp. 280.268.540,-
4. Bangunan gedung kantor permanen lainnya rek. Pembangunan gedung Kesbangpol Prov. Jambi Tahun 2015 Rp. 261.178.660,- jadi total mutasi Dinas PU dan Perumahan Rakyat ke Badan Kesbangpol sebesar Rp. 845.692.857,-